

ABSTRAK

PERPEKTIF PENEGAKKAN HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH APARAT KEPOLISIAN

Fadjarina Avrina Noerdin (2210623048), Bambang Waluyo, Beniharmoni Harefa

Penelitian ini mengidentifikasi, menganalisis, dan mereformulasi landasan yuridis mengenai sanksi pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan menitik beratkan kepada kebijakan kriminalisasi dalam penerapan sanksi pidana pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan batasan minimum sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan kode etik untuk Kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KUHP baru dan UU PKDRT mengalami evolusi signifikan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. UU KUHP baru mengatur kekerasan seksual dengan memadukan elemen UU PKDRT, meskipun dengan ancaman pidana lebih ringan. UU PKDRT memperkenalkan sistem perumusan sanksi pidana alternatif, memberi hakim fleksibilitas, namun tantangan utama adalah konsistensi penegakan hukum dan penerapan kode etik profesi di aparat penegak hukum, seperti yang diatur dalam Kode Etik POLRI.

Kata Kunci: KDRT, kepolisian, penegakan hukum, sanksi pidana.

ABSTRACT

PERSPECTIVE OF LAW ENFORCEMENT REGARDING CRIMINAL SANCTIONS FOR DOMESTIC VIOLENCE BY POLICE OFFICERS

Fadjarina Avrina Noerdin (2210623048), Bambang Waluyo, Beniharmoni Harefa

This research identifies, analyzes, and reformulates the juridical basis regarding criminal sanctions for domestic violence committed by law enforcement officials. By focusing on the criminalization policy in the application of criminal sanctions in the Law on the Elimination of Domestic Violence and the minimum limit of criminal sanctions for domestic violence according to Indonesian legislation and the application of the code of ethics for the Police. This research uses a normative juridical approach, namely by examining/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials, by understanding the law as a set of positive rules or norms in the legislative system that regulates human life. The results show that the new Criminal Code Law and the PKDRT Law have undergone significant evolution in dealing with domestic violence in Indonesia. The new Criminal Code Law regulates sexual violence by incorporating elements of the PKDRT Law, albeit with lighter criminal penalties. The PKDRT Law introduces a system of formulating alternative criminal sanctions, giving judges flexibility, but the main challenge is the consistency of law enforcement and the application of professional codes of ethics in law enforcement officials, such as those stipulated in the POLRI Code of Ethics.

Keywords: *criminal sanctions, domestic violence, law enforcement, police*